



## DINAMIKA KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

**Siva Indana Arisanti**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Baharudin Rachman**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Rini Puji Astuti**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,  
Jawa Timur, 68136

Korespondensi penulis: [arisanti0309@gmail.com](mailto:arisanti0309@gmail.com)

**Abstrak.** *This study aims to analyze the dynamics of monetary policy in controlling inflation and promoting economic growth in Indonesia. The research problem focuses on assessing the effectiveness of monetary policy instruments such as benchmark interest rates, reserve requirements, and open market operations in achieving price stability while encouraging national economic growth. A qualitative literature review method was employed, combining findings from previous studies, official reports from Bank Indonesia, and relevant secondary data. The results indicate that the implementation of monetary policy, particularly through the inflation targeting framework and innovations such as the BI 7-Day Reverse Repo Rate, has contributed to reducing inflation and maintaining sustainable economic growth. Furthermore, the synergy between monetary policy and fiscal policy has strengthened Indonesia's macroeconomic stability. The study concludes that the effectiveness of monetary policy depends on the accuracy of instruments, the credibility of the monetary authority, and the coordination across policies to address both domestic and global economic dynamics.*

**Keywords:** *Economic Growth; Indonesia; Inflation; Macroeconomic Stability; Monetary Policy*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana efektivitas instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka dalam mencapai stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan hasil penelitian terdahulu, laporan resmi Bank Indonesia, dan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moneter, terutama melalui inflation targeting framework dan inovasi instrumen moneter seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate, telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal turut memperkuat stabilitas makroekonomi Indonesia. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan moneter bergantung pada ketepatan instrumen, kredibilitas otoritas moneter, dan koordinasi lintas kebijakan guna menghadapi dinamika ekonomi domestik maupun global.

**Kata Kunci:** Indonesia; Inflasi; Kebijakan Moneter; Pertumbuhan Ekonomi; Stabilitas Makroekonomi

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketidakpastian ekonomi, keterkaitan pasar keuangan internasional, serta transformasi teknologi yang cepat, kebijakan moneter memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar, yang secara langsung memengaruhi laju inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta daya saing nasional di

pasar global. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan moneter yang adaptif terhadap dinamika ekonomi domestik maupun global. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga acuan, seperti BI Rate dan BI 7-Day Reverse Repo Rate, yang menjadi panduan dalam menentukan suku bunga pasar serta mengarahkan kebijakan dalam upaya mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan, seperti volatilitas nilai tukar, tekanan eksternal, ekspektasi pasar, serta kompleksitas variabel makroekonomi lainnya.

Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merespons perubahan global dan mengelola ketidakseimbangan ekonomi secara cermat. Seperti dikemukakan oleh Sodik et al. (2024), salah satu dilema utama kebijakan moneter adalah menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan dorongan terhadap pertumbuhan. Suku bunga tinggi, misalnya, dapat menekan inflasi namun juga berisiko menghambat investasi dan konsumsi. Sebaliknya, kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat memicu tekanan inflasi yang berlebihan jika tidak diimbangi dengan strategi pengawasan yang tepat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter menghadapi tantangan struktural, antara lain rendahnya tingkat inklusi keuangan, ketergantungan terhadap modal asing, dan infrastruktur keuangan yang belum merata. Globalisasi menambah lapisan kompleksitas baru, terutama dalam hal menjaga stabilitas nilai tukar serta menghadapi arus modal yang fluktuatif. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dituntut tidak hanya mampu menjaga kestabilan makroekonomi, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global yang bergerak cepat.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator utama dalam pengelolaan ekonomi makro. Inflasi yang tidak terkendali dapat memicu ketimpangan pendapatan, menurunkan tabungan domestik, dan merusak struktur perdagangan. Sebaliknya, inflasi yang rendah dan stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan moneter yang tepat memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta menstimulasi aktivitas produksi dan konsumsi. Menurut Hakiki et al. (2024), hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan kebijakan yang seimbang. Koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga sangat dibutuhkan untuk mencapai kestabilan ekonomi makro yang menyeluruh. Dalam situasi tekanan inflasi tinggi atau perlambatan ekonomi, penyesuaian instrumen kebijakan seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas menjadi langkah penting yang harus diambil oleh bank sentral.

Dalam pengalaman beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari dampak pandemi COVID-19, fluktuasi harga komoditas global, hingga gejolak geopolitik. Kondisi ini menguji fleksibilitas dan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika kebijakan moneter menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Lebih jauh lagi, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, keadilan dalam distribusi pendapatan, serta keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Seperti dijelaskan oleh Rahmah Saiyed (2021) dan Ghofur et al. (2024), stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya ditujukan pada aspek angka-angka makro, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan moneter harus

mampu mendukung distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai dinamika kebijakan moneter Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan menelaah evolusi instrumen kebijakan, efektivitas implementasi, serta tantangan terkini. Artikel ini akan membahas landasan teori, implementasi historis dan empiris kebijakan moneter, serta rekomendasi kebijakan, sebelum diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi bagi pengambil kebijakan.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan stabilitas nilai tukar guna mencapai stabilitas ekonomi makro. Bain dan Howel (2003) menyatakan bahwa kebijakan moneter yang efektif harus bersifat responsif terhadap kondisi pasar serta memiliki transmisi yang jelas ke sektor riil dan keuangan. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dalam hal harga barang dan jasa (inflasi), maupun nilai tukar terhadap mata uang lain. Kerangka kerja inflation targeting framework yang diadopsi sejak 2005 menjadi pendekatan utama Bank Indonesia dalam mengarahkan kebijakan moneter secara transparan dan kredibel.

### **2. Teori Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Menurut Sugiono (2002), inflasi yang stabil menciptakan kepastian harga, mendorong investasi, dan menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi tabungan, mendorong spekulasi, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Teori pertumbuhan menempatkan peran stabilitas makroekonomi sebagai landasan utama untuk mendorong aktivitas sektor riil. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan moneter tidak hanya diukur dari rendahnya inflasi, tetapi juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **3. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah proses bagaimana keputusan bank sentral, seperti perubahan suku bunga acuan, memengaruhi variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, inflasi, dan pertumbuhan. Warjiyo et al. (2003) menguraikan bahwa transmisi moneter di Indonesia terjadi melalui beberapa jalur: suku bunga, nilai tukar, kredit, harga aset, dan ekspektasi pelaku ekonomi. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kecepatan dan kekuatan reaksi sektor keuangan terhadap kebijakan bank sentral. Dalam praktiknya, transmisi di negara berkembang seperti Indonesia bisa terhambat oleh struktur pasar keuangan yang belum efisien atau rendahnya literasi ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) yang difokuskan untuk menelaah berbagai sumber referensi akademik dan institusional yang relevan dengan topik kebijakan moneter, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sasaran utama penelitian ini adalah dokumen dan publikasi ilmiah seperti jurnal terakreditasi, buku teks ekonomi moneter, laporan resmi Bank Indonesia, data statistik dari BPS, IMF, World Bank, serta bahan ajar dari perkuliahan (overview kelas). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui berbagai platform seperti Google Scholar, Perpustakaan, DOAJ, dan situs resmi lembaga pemerintah, menggunakan pedoman telaah isi dokumen yang berfokus pada tiga variabel utama: kebijakan moneter, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis, yaitu dengan mengkaji secara sistematis isi dari setiap dokumen, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menarik hubungan antar konsep melalui proses reduksi data, penyajian naratif tematik, dan penarikan simpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi terpercaya. Metode ini merujuk pada pendekatan kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell (2014) dan Bowen (2009), yang menekankan pentingnya kedalaman analisis serta kejelasan konteks dalam penelitian berbasis dokumen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Kebijakan Moneter di Indonesia**

Kebijakan moneter Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak masa Orde Baru hingga era modern. Pada masa Orde Baru, kebijakan moneter dijalankan dalam konteks ekonomi yang lebih tertutup dan bersifat administratif, di mana Bank Indonesia (BI) masih berada di bawah kendali pemerintah. Perubahan besar terjadi setelah krisis ekonomi 1997–1998, yang mendorong reformasi sektor keuangan dan moneter. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI memperoleh independensi sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai rupiah, mencakup stabilitas harga dan sistem keuangan. Hal ini menjadi titik balik penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih terarah dan profesional.

Seiring perkembangan ekonomi global dan domestik, BI mengadopsi kerangka kerja inflation targeting framework pada tahun 2005, di mana fokus utama kebijakan moneter

diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi. Perubahan ini menandai komitmen BI terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Inflasi dijadikan sebagai indikator kunci keberhasilan kebijakan moneter. Penyesuaian strategi ini sejalan dengan rekomendasi global dari lembaga seperti IMF dan World Bank untuk negara berkembang dalam membangun kerangka kebijakan moneter yang kredibel dan antisipatif terhadap gejolak global

## **2. Instrumen Kebijakan Moneter dan Efektivitasnya**

Instrumen utama yang digunakan BI dalam menjalankan kebijakan moneter antara lain suku bunga acuan (BI Rate dan BI 7-Day Reverse Repo Rate), operasi pasar terbuka (OPT), cadangan wajib minimum (GWM), dan intervensi nilai tukar. Pergantian dari BI Rate ke BI 7-Day Reverse Repo Rate pada 2016 dilakukan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor keuangan. Berdasarkan laporan BI (2023), transmisi kebijakan melalui jalur suku bunga lebih efektif setelah reformasi tersebut, yang tercermin dalam penurunan suku bunga pinjaman dan peningkatan likuiditas di pasar uang.

Efektivitas kebijakan juga terlihat dari keberhasilan menjaga inflasi dalam kisaran target  $3\pm 1\%$  sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama dari sisi tekanan eksternal seperti imported inflation dan volatilitas harga energi global. Intervensi pasar valuta asing juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap mendukung kestabilan harga. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas instrumen moneter sangat tergantung pada kondisi pasar, ekspektasi pelaku ekonomi, dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah.

## **3. Kebijakan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selama pandemi COVID-19, BI mengambil langkah ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan ke level 3,5%, level terendah sepanjang sejarah, sebagai upaya mendorong konsumsi dan investasi. Langkah ini dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial akomodatif seperti pelonggaran rasio loan to value (LTV) dan dorongan kredit kepada sektor produktif.

Simbolan dan Rangkuti (2023) menekankan bahwa penjaminan kredit yang sehat dan pengendalian risiko pembiayaan menjadi kunci dalam mendukung transmisi kebijakan moneter melalui sektor perbankan. Ketika sektor keuangan stabil, penyaluran kredit menjadi lebih optimal, dan efek kebijakan suku bunga terhadap aktivitas riil menjadi lebih terasa. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh instrumen moneter itu sendiri, tetapi juga oleh infrastruktur keuangan dan tata kelola risiko yang mendukung.

## **4. Digitalisasi Moneter dan Inklusi Keuangan**

Dalam beberapa tahun terakhir, BI mengembangkan strategi digitalisasi sistem pembayaran melalui peluncuran BI-FAST, QRIS, dan penguatan infrastruktur pembayaran digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses keuangan, serta mempercepat transmisi kebijakan moneter. BI melaporkan bahwa hingga akhir 2023, jumlah merchant yang menggunakan QRIS meningkat lebih dari 200% dibanding tahun sebelumnya, dengan mayoritas pelaku UMKM.

Digitalisasi berperan penting dalam mempercepat perputaran uang di masyarakat, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung tujuan inklusi keuangan nasional. Hal ini juga memperkuat transmisi kebijakan suku bunga melalui saluran digital banking. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung ke sistem keuangan formal, efektivitas kebijakan moneter menjadi lebih merata dan inklusif.

## **5. Tantangan dan Prospek Kebijakan Moneter**

Meskipun telah mengalami kemajuan, kebijakan moneter Indonesia tetap menghadapi tantangan signifikan. Ketergantungan terhadap modal asing, fluktuasi harga komoditas global, dan dampak dari kebijakan moneter negara maju (seperti The Fed) masih menjadi ancaman bagi stabilitas makroekonomi nasional. Selain itu, ketimpangan transmisi kebijakan antar wilayah dan sektor menunjukkan bahwa tidak semua kelompok ekonomi merasakan dampak kebijakan secara merata.

Ke depan, BI perlu memperkuat strategi berbasis data (*data-driven policy*), meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK, serta mendorong inklusi keuangan berbasis teknologi. Pendekatan kebijakan yang fleksibel dan adaptif sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Selain itu, peningkatan literasi ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam hal kerangka kerja, instrumen, maupun strategi pelaksanaannya. Sejak diterapkannya *inflation targeting framework* pada 2005 dan perubahan instrumen kebijakan dari BI Rate ke BI 7-Day Reverse Repo Rate, efektivitas kebijakan moneter semakin meningkat, terutama dalam menjaga inflasi dalam kisaran target dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum telah memainkan peran penting dalam mengelola stabilitas harga. Di sisi lain, sinergi dengan kebijakan fiskal, penguatan sistem keuangan, serta digitalisasi moneter melalui BI-FAST dan QRIS turut memperluas jangkauan dan efektivitas kebijakan moneter terhadap sektor riil. Meskipun demikian, kebijakan moneter Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, sensitivitas terhadap dinamika global, dan ketimpangan transmisi antarwilayah. Oleh karena itu, penting bagi otoritas moneter untuk terus memperkuat basis data ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika kebijakan moneter Indonesia dalam kerangka *dual-target*: menjaga inflasi dan mendorong pertumbuhan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan moneter yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika global dan transformasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alamsyah, H. (2021). "Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Transmisi Kebijakan Moneter." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 120–135.

- Bain, K., & Howel, P. (2003). *Monetary Economics: Policy and Its Theoretical Basis*. London: Palgrave Macmillan.
- Bank Indonesia. (2021). *Outlook Ekonomi dan Kebijakan Moneter*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/ekonomi/Pages/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Sistem Pembayaran Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/lspi/Pages/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI.aspx>
- Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ghofur, A., & Sari, H. (2024). "Integrasi Kebijakan Moneter dan Stabilitas Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 45–58.
- Hakiki, M., Wulandari, R., & Yusuf, S. (2024). "Inflasi dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Analisis Empiris." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Makro*, 10(1), 1–12.
- IMF. (2023). *Indonesia Country Report: Economic Outlook*. <https://www.imf.org/en/Countries/IDN>
- Rahmah Saiyed. (2021). "Price Stability in Islamic Economics: Between Theory and Reality." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 65–78.
- Simbolan, R., & Rangkuti. (2023). "Analisis Strategi Penjamin Kredit dan Pengendalian Kredit dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat." *Journal of Comprehensive Science*, 3(1), 78–89.
- Sugiono, F.X. (2002). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Warjiyo, P., Abar, S., & Agung, I. G. N. (2003). *Bank Indonesia: Bank Sentral RI, Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*. Jakarta: PPSK–BI.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Growth amidst Global Uncertainty*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/39687>
- Yuliana, D. (2022). "Peran BI-7DRR dalam Menjaga Stabilitas Harga di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 17(1), 34–46.